

**Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
Di Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng
Oleh : Luh Rupini¹ dan Dewa Made Joni Ardana²**

Abstraksi

Dalam setiap proses pembangunan, masyarakat harus dilibatkan secara aktif karena masyarakatlah yang menjadi subjek dalam pembangunan tersebut. Pembangunan di desa akan berhasil mencapai tujuannya jika masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan program pembangunan bagi dari segi gotong royong ataupun dalam pengumpulan dana swadaya murni masyarakat untuk menopang dana pokok serta mampu memberdayakan segenap potensi yang ada di desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu: 1) bagaimanakah bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Sangsit ?, dan 2) apakah hambatan-hambatan yang dijumpai oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa di Desa Sangsit ?

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat Desa Sangsit berpartisipasi dalam pembangunan desa dimulai dari proses perencanaan melalui Musrenbangdes, pelaksanaan pembangunan, ikut dalam pengawasan dan evaluasi pembangunan itu sendiri. Serta berpartisipasi dalam pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Beberapa hambatan dijumpai oleh masyarakat Desa Sangsit untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, yakni hambatan internal yang berupa kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Hambatan eksternal berupa kondisi politik dan keamanan wilayah Desa Sangsit dan sekitarnya.

kata kunci : partisipasi, masyarakat, pembangunan desa.

¹ Staf Administrasi Camat Sawan, ² Staf Pengajar Universitas Panji Sakti

1. Pendahuluan

Desa merupakan kesatuan terkecil pemerintahan di Indonesia memiliki potensi yang harus dikembangkan. Hal ini disebabkan karena desa merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan, betapa tidak mengingat sekitar 80 % penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa dan bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu membangun desa berarti pula membangun sebagian kecil negara pada sektor tertentu. Tolok ukur keberhasilan pembangunan di desa terlihat dengan adanya perubahan yang mengarah pada perbaikan perilaku, ekonomi, dan mental yang bisa dirasakan manfaatnya secara langsung. Dalam pembangunan di

desa kadang-kadang orientasi pembangunan dimaknai sempit sehingga masyarakat hanya terpaku pada pembangunan fisik saja, sedangkan pembangunan dalam arti luas tidaklah demikian namun menyangkut fisik dan mental. Inilah yang menjadi salah satu sebab gagalnya pembangunan di Indonesia selama ini, dimana keberhasilan pembangunan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk (Chaniago,2001 : 2).

Pembangunan di desa adalah merupakan perpaduan kegiatan pemerintah dan masyarakat. Kegiatan pemerintah dilakukan melalui program-program sektoral dari berbagai kementerian dan lembaga non kementerian. Masyarakat hendaknya berperan dalam mendukung dan menyukseskan program-program yang dijalankan oleh pemerintah.

Dalam hubungan ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pengarahan, pembinaan, dan bantuan dalam batas kemampuan yang tersedia disertai dengan pengawasan yang intensif. Partisipasi dalam pembangunan desa diwujudkan dalam bentuk prakarsa atau swadaya gotong royong masyarakat. Antara program sektoral harus dapat saling mengisi, harus ada saling berkaitan dan ketergantungan. Demikian pula antara program-program sektoral dengan kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan dengan prinsip-prinsip pembangunan desa adalah menyeluruh, terpadu, terkoordinir, dinamis, dan berkelanjutan (*sustained*) dengan memperhatikan adanya keseimbangan kewajiban yang serasi dengan kegiatan masyarakat (Tjokrowinoto, 2012 : 10).

Sesuai dengan pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa : “ Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa “. Selanjutnya pada pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga disebutkan, “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. Sasaran utama pembangunan desa adalah

untuk mewujudkan desa-desa atau kelurahan di seluruh wilayah Republik Indonesia memiliki tingkat perkembangan dengan klasifikasi desa swasembada, yaitu desa-desa yang maju dan berkembang dimana masyarakat memiliki taraf hidup serta kesejahteraan yang terus meningkat.

Jadi dalam proses pembangunan desa, masyarakat harus bisa secara aktif untuk berpartisipasi dalam mewujudkan program pembangunan baik dari segi gotong royong ataupun dalam pengumpulan dana swadaya murni masyarakat untuk menopang dana pokok serta mampu memberdayakan segenap potensi yang ada di wilayah desa yang dipimpinnya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mengatakan bahwa, Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

Akan tetapi berdasarkan pengamatan pendahuluan yang dilakukan, apa yang secara ideal menjadi harapan kita bersama tetapi kenyataannya berbeda ditemukan di berbagai desa khususnya di Desa Sangsit. Kesadaran masyarakat desa Sangsit untuk secara swadaya berperan serta secara aktif dalam setiap program pembangunan masih tergolong rendah. Jangankan untuk ikut menyumbangkan materinya dan tenaganya dalam program-program pembangunan, untuk ikut sekedar bergotong royong membersihkan lingkungan saja masih jarang masyarakat yang mau melibatkan dirinya.

Hal lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program-program pembangunan di desa Sangsit adalah kurangnya kebersamaan yang dimiliki oleh warga masyarakat, sebagai akibat dari terkotak-kotaknya masyarakat dalam kelompok-kelompok berdasarkan aspirasi politik. Hal tersebut berdampak pada kurangnya inisiatif warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi menyumbangkan pikiran untuk memberi masukan, gagasan ataupun ide-ide dalam proses pembangunan. Mereka terkesan cuek dan kurang peduli dengan pembangunan di desanya.

Seperti hasil penelitian yang disampaikan oleh Mudiarsa (2015), ditemukan fakta bahwa keberadaan partai politik dan pilihan masyarakat menjadi kendala dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Seorang

Kepala Dusun yang secara politik berbeda warna dengan sebagian besar anggota masyarakatnya akan mengalami kesulitan dalam menggerakkan dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Sangsit. Masyarakat terkadang cuek dengan arahan atau ajakan dari Kepala Dusunnya karena perbedaan aspirasi politik tersebut. Hal tersebut sangat kentara ketika baru saja selesainya perhelatan pesta demokrasi seperti Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah. Diperlukan waktu lebih dari 2 (dua) tahun supaya masyarakat bisa melupakan peristiwa politik yang terjadi tersebut.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng ?; dan 2) Apakah hambatan-hambatan yang dijumpai oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa di Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng ?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bungin (2012: 32), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Sedangkan menurut Trianto (2009 : 179) penelitian kualitatif adalah penelitian yang percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dngan situasi sosial mereka.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini terutama adalah Perbekel Sangsit beserta perangkatnya, BPD, LPM, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat Desa Sangsit Kecamatan Sawan. Informan tersebut ditunjuk secara *purposive* dengan mempertimbangkan pengetahuan mereka tentang masalah yang ditelaah.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah : 1) Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Sangsit, yang meliputi : partisipasi masyarakat dalam perencanaan, partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi, serta partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hasil-hasil pembangunan: 2) Hambatan-hambatan yang dijumpai masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa di Desa Sangsit, yang meliputi :hambatan internal: kondisi sosial, budaya dan ekonomi, serta hambatan eksternal : kondisi politik dan keamanan

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, dengan tujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selanjutnya menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Dalam hal ini analisis dilakukan sepanjang berlangsungnya penelitian dengan menggunakan empat tahapan yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2013)

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Sangsit

Keberhasilan suatu program pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau pihak lain, tetapi juga ditentukan oleh seberapa besar partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan itu sendiri. Dalam setiap program pembangunan, masyarakatlah yang menjadi subjek dari pembangunan itu. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dengan memberikan bantuan dana dan kemudahan administrasi serta fasilitas-fasilitas lainnya. Arah dan hasil pembangunan itu sendiri sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat ikut berpartisipasi dalam program pembangunan tersebut. Apalagi dalam program pembangunan desa yang memang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengentaskan masyarakat desa dari kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Menyadari akan pentingnya partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan di desa, maka masyarakat di Desa Sangsit sangat antusias menyambut adanya berbagai program pembangunan yang ada di desanya.

Dari hasil wawancara dengan Perbekel dan Ketua BPD Desa Sangsit, dapat diketahui bahwa keterlibatan masyarakat Desa Sangsit dalam setiap program pembangunan memang sudah dimulai sejak proses perencanaan. Seperti diketahui, untuk memulai suatu tahapan pembangunan khususnya di desa, selalu diawali dengan proses perencanaan melalui suatu kegiatan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Perencanaan yang matang terhadap suatu program atau kegiatan yang akan dilaksanakan, sangat berdampak positif terhadap keberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan tersebut dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan (Tjokroamidjojo, 2006). Dengan perencanaan yang baik akan dapat dilakukan suatu perkiraan atau *forecasting* terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan tidak hanya dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan, tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Dengan perencanaan juga dilakukan penyusunan skala prioritas terhadap berbagai alternatif pilihan pekerjaan yang harus dilakukan.

Masyarakat Desa Sangsit menyadari betul akan pentingnya suatu perencanaan sebelum mereka memulai suatu proyek atau program pembangunan. Untuk itulah mereka selalu menyusun rencana yang baik dan matang sebelum mereka memulai pelaksanaan suatu program pembangunan. Perencanaan tersebut biasanya dilaksanakan pada setiap akhir tahun untuk menyusun rencana pembangunan pada tahun berikutnya. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Musrenbangdes yang selalu dilaksanakan pada akhir tahun yakni pada bulan Desember. Musyawarah tersebut melibatkan seluruh komponen masyarakat dari perangkat desa, BPD, LPM, para kepala dusun, Kelian Desa Pakraman, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Dari pertemuan atau musyawarah tersebut akan dapat ditampung berbagai usulan pembangunan dari berbagai kebutuhan masyarakat yang mungkin bisa dibiayai melalui dana desa, swadaya masyarakat, ataupun dana yang mungkin berasal dari bantuan pemerintah. Usulan-usulan tersebut biasanya disampaikan oleh Kepala Dusun / Kelian Banjar serta LPM dan tokoh-tokoh masyarakat termasuk anggota BPD, dimana sebelum mereka mengikuti Musrenbangdes, biasanya mereka terlebih dahulu menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Dari hal-hal yang disampaikan oleh informan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan begitu penting sebelum memulainya suatu program pembangunan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Siagian (2006) yang mendefinisikan “perencanaan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan”. Pendapat tersebut didukung oleh Harahap (2011), yang menyebutkan fungsi perencanaan sangat penting sebagai langkah awal setiap pelaksanaan kegiatan yang baik. Rencana merupakan garisan tentang kegiatan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Rencana dirumuskan untuk menggambarkan apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

Keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi salah satu faktor penentu dari keberhasilan pembangunan itu sendiri. Tanpa dukungan aktif dari masyarakat proses pembangunan akan mengalami hambatan dan gangguan yang pada akhirnya berujung pada kegagalan. Sebagai subjek pembangunan masyarakat harus diupayakan untuk terlibat dalam proses pembangunan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan serta pemeliharaan dan pengembangan suatu hasil pembangunan (Soetrisno, 2005).

Masyarakat harus diizinkan untuk menciptakan pembangunan, bukan melulu mendukung pembangunan. Dalam hal ini masyarakat diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri jenis dan arah pembangunan yang mereka anggap perlu dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Dalam diri masyarakat harus ditumbuhkan kesadaran akan rasa memiliki terhadap berbagai program dan

proyek pembangunan yang telah dilaksanakan. Sehingga kesinambungan pembangunan khususnya pembangunan di desa akan dapat terus dijaga dan dipelihara.

Setelah melaksanakan Musrenbangdes dimana masyarakat desa Sangsit menyusun dan merencanakan berbagai program yang akan dilaksanakan di desanya, tahapan selanjutnya adalah melaksanakan semua rencana program yang telah disusun dan ditentukan tersebut. Penentuan program pembangunan biasanya selalu berdasarkan skala prioritas dan kemanfaatannya bagi sebagian besar masyarakat Desa Sangsit.

Berdasarkan hasil Musrenbangdes yang dilaksanakan pada 22 Desember 2015 untuk pelaksanaan pembangunan di tahun 2016, setelah melalui proses musyawarah dan diskusi diantara tokoh-tokoh masyarakat dan warga masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya, akhirnya diputuskan beberapa program pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik yang dilaksanakan pada tahun 2016. semua program-program pembangunan tersebut tentunya disesuaikan dengan ketersediaan dana yang dimiliki oleh pemerintah Desa Sangsit.

Disamping mengandalkan dana yang berasal dari pemerintah dan dana desa, program pembangunan di desa Sangsit juga sangat mengharpkan adanya uluran bantuan dan partisipasi masyarakat secara sukarela untuk memperlancar pengerjaan program tersebut. Partisipasi masyarakat tersebut bisa berupa sumbangan tenaga dalam pengerjaan proyek-proyek pembangunan. Juga bisa berupa materi baik itu berupa uang tunai maupun material untuk bahan proyek kalau proyek itu berupa pembangunan fisik.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa Sangsit tersebut, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisiknya, melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Partisipasi masyarakat Desa Sangsit tersebut berupa terlibat aktif dalam semua kegiatan dengan ikut bergotong royong dalam pembangunan fisik maupun dalam bentuk sumbangan materi.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Sangsit selama ini sudah cukup berpartisipasi dalam setiap

kegiatan pembangunan di desanya. Mereka memiliki kesediaan dan secara sukarela membantu kegiatan pembangunan di desanya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya demi berhasilnya program-program pembangunan di desanya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bharacharya (Ndraha, 2004) yang mengatakan bahwa partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti pengorbanan diri sendiri. Hal ini didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Koentjaraningrat (2002), yang mengatakan bahwa partisipasi rakyat terutama masyarakat pedesaan dalam pembangunan, sebenarnya menyangkut partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan yang khusus dan partisipasi sebagai individu di luar aktivitas bersama dalam pembangunan.

Disamping berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desanya, masyarakat juga hendaknya terus berpartisipasi dalam pengawasan serta mengevaluasi program-program pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan. Karena bagaimanapun, pembangunan yang telah menghabiskan dana yang begitu besar nantinya harus dapat bermanfaat bagi kepentingan seluruh masyarakat. Jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam proses pelaksanaan pembangunan terutama dalam penggunaan dananya, yang tentunya berdampak pada kualitas hasil pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini masyarakat bersama BPD berkewajiban untuk melakukan pengawasan atau monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan di desa.

Pengawasan itu merupakan bagian terpenting dalam suatu program atau kegiatan. Terlebih kegiatan tersebut menggunakan anggaran yang berasal dari pemerintah atau swadaya masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Subarsono (2007 : 113), yang mengatakan bahwa pengawasan atau monitoring dilaksanakan ketika suatu program atau kebijakan sedang diimplementasikan. Pengawasan diperlukan agar kesalahan-kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan perbaikan, sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. Lebih jauh dikemukakan oleh Subarsono (2007), bahwa pengawasan

atau monitoring dilaksanakan agar kebijakan atau program pembangunan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Disamping melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di desanya, masyarakat desa juga diharapkan berpartisipasi dalam melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan. Dalam hal ini ketika program pembangunan tersebut telah selesai dilaksanakan. Evaluasi terhadap program pembangunan khususnya yang ada di Desa Sangsit bertujuan untuk mengetahui apakah program pembangunan tersebut sudah mencapai sasaran dan tujuan seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Juga untuk mengetahui berapa biaya yang telah dihabiskan serta manfaat dari program pembangunan tersebut.

Dari hal-hal yang disampaikan oleh informan lewat hasil wawancara, didukung oleh beberapa dokumen yang diperoleh di kantor Perbekel Desa Sangsit, dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kegiatan mutlak harus dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar biaya yang telah dihabiskan untuk kegiatan tersebut, manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kegiatan tersebut. Juga sebagai bahan masukan untuk kegiatan yang akan datang. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Subarsono (2007: 120 –121), bahwa evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :

- (1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- (2) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- (3) Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
- (4) Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- (5) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan.
- (6) Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kegiatan atau program yang akan datang.

Pada akhirnya masyarakat harus berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Sehubungan

dengan hal tersebut, masyarakat desa Sangsit selalu dihimbau oleh Perbekel atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya untuk selalu menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Menjaga dan memelihara memang lebih sulit dari membuat atau membangunnya. Menjaga dan memelihara hasil pembangunan diperlukan kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk ikut merasa memiliki hasil-hasil pembangunan tersebut.

3.2. Hambatan-hambatan yang dijumpai masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa di Desa Sangsit

Keterlibatan secara aktif masyarakat dalam setiap program pembangunan di desa tentunya tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan di Desa Sangsit sudah barang tentu menemui berbagai hambatan, terlebih kondisi sosial budaya masyarakat Desa Sangsit yang heterogen. Berbagai hambatan akan muncul baik itu berasal dari internal masyarakat desa Sangsit sendiri, maupun berasal dari luar masyarakat Desa Sangsit.

Beberapa faktor internal yang bisa menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Sangsit adalah : kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat desa Sangsit itu sendiri. Sedangkan hambatan eksternalnya berupa kondisi politik dan keamanan.

Kondisi sosial yang bisa menjadi penghambat partisipasi masyarakat Desa Sangsit untuk berpartisipasi dalam pembangunan di desanya yakni situasi kekeluargaan dan sistem gotong royong yang sudah mulai berkurang, apalagi Sangsit termasuk desa yang berada dekat dengan kota Singaraja, sehingga sifat egoisme masyarakatnya bisa lebih menonjol.

Situasi kekeluargaan masyarakat desa Sangsit menjadi penghambat untuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, biasanya muncul apabila pelaksanaan proyek atau pemborong merupakan anggota keluarga dari tokoh masyarakat tertentu. Apalagi kemudian tokoh masyarakat tersebut memang disegani dan berpengaruh besar di lingkungan masyarakat Desa Sangsit. Misalnya kalau pelaksana proyek tersebut adalah kerabat dari Ketua atau anggota BPD, atau

bahkan kerabat dari Perbekel. Hal ini tentu akan menyulitkan masyarakat yang ingin melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan warga masyarakat desa Sangsit menunjukkan bahwa acuh tak acuhnya masyarakat terhadap program-program pembangunan di desa Sangsit, salah satunya disebabkan karena adanya ketidakadilan dari proses pembagian bantuan pemerintah terutama bantuan untuk masyarakat miskin. Hubungan kekeluargaan menjadi pemicu ketidakadilan tersebut. Dampaknya, masyarakat yang diperlakukan secara tidak adil tersebut, akan sulit diharapkan partisipasinya dalam program-program pembangunan di desa. Mereka akan menjadi masyarakat yang cuek dan tidak peduli dengan program-program pembangunan di desanya.

Sistem kegotongroyongan dalam masyarakat desa terlebih desa yang lokasinya sangat dekat dengan perkotaan, belakangan ini sudah mulai berkurang. Masyarakat dihadapkan pada situasi ekonomi dan tuntutan hidup yang semakin tinggi yang memaksa mereka untuk lebih mementingkan kepentingan diri dan keluarganya dibandingkan harus bergotong royong mengerjakan sesuatu yang tidak mendapatkan upah. Kondisi masyarakat yang seperti ini, meskipun hanya sebagian kecil dari masyarakat yang seperti itu, tetap juga menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Bisa saja yang jumlahnya sedikit itu menulari masyarakat yang lebih besar.

Kehidupan dan kebutuhan ekonomi serta tuntutan hidup yang semakin tinggi, menjadi penyebab mulai tergerusnya asas kegotong royongan tersebut. Diperlukan usaha keras dari tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa membangkitkan kembali gairah masyarakat desa agar mau aktif bergotong royong membangun desanya. Karena bagaimanapun pembangunan desa akan berhasil apabila masyarakat desa itu sendiri terlibat aktif dalam setiap program-program pembangunan.

Kondisi budaya masyarakat juga bisa menjadi penghambat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. Kesibukan masyarakat desa khususnya yang beragama hindu yang terikat dengan adat dan *dadia*, terkadang membuat masyarakat mengabaikan partisipasinya dalam program-program pembangunan di

desanya. Apalagi jika pelaksanaan kegiatan *dadia* tersebut bersamaan waktunya dengan pelaksanaan suatu kegiatan di desa.

Faktor budaya yang lain yang juga menjadi penghambat partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di desa adalah seringnya ada kegiatan *tajen* di desa. Baik itu *tajen* dalam rangkaian kegiatan upacara piodalan di pura, yang biasa disebut *tabuh rah*, maupun kegiatan *tajen* dalam bentuk judi yang sering diselenggarakan di desa.

Tajen merupakan salah satu faktor penghambat keterlibatan masyarakat dalam program-program pembangunan. Dalam masyarakat bali, *tajen* bukanlah suatu kebudayaan baru, melainkan bersifat menyejarah. Bahkan yang tidak kalah pentingnya, *tajen* memiliki multimakna, tidak saja bagi penjudi atau *bebotoh*, tetapi juga pada sektor-sektor lain yang terkait dengannya. Karena itu, menurut Atmaja (2011) tidak mudah untuk menghapuskan *tajen* dari perbendaharaan kebudayaan Bali.

Selanjutnya yang juga menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah faktor ekonomi. Seperti yang telah disinggung di atas, sebagai dampak dari era globalisasi dan sifat materialis dari sebagian besar masyarakat termasuk masyarakat desa, menjadikan perubahan dalam pola pikir masyarakat itu sendiri. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi menjadikan mereka lebih peduli pada pekerjaan yang menghasilkan uang daripada ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa seperti bergotong royong yang terkadang tidak menghasilkan uang sama sekali.

Selain faktor internal, juga terdapat beberapa faktor eksternal yang menjadi penghambat adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa. Faktor eksternal tersebut meliputi faktor politik dan keamanan. Disebut faktor eksternal karena masalah politik dan keamanan ini memang berada di luar kondisi masyarakat desa Sangsit.

Beberapa perhelatan pesta demokrasi seperti salah satunya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Buleleng, yang diselenggarakan pada 15 Februari 2017, sedikit banyaknya berpotensi menjadi penghambat partisipasi masyarakat desa Sangsit dalam pembangunan di desa. Karena situasi politik yang

semakin menghangat menjelang gelaran Pilkada yang semakin dekat, menyebabkan situasi di masyarakat agak terpecah menjadi dua bagian, karena Pilkada Buleleng nanti diikuti oleh dua pasangan calon yang akan memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng untuk periode 2017 – 2022.

Akibat lain yang ditimbulkan oleh adanya situasi politik yang menghangat menjelang pelaksanaan pesta demokrasi, juga berdampak pada partisipasi masyarakat untuk ikut aktif dalam proses perencanaan pembangunan di desa yang dilaksanakan lewat Musrenbangdes. Masyarakat yang datang ke acara Musrenbangdes menjadi berkurang karena mereka disibukkan dengan acara dukung mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dipilihnya nanti.

Kondisi keamanan di wilayah desa Sangsit juga menjadi faktor yang bisa menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa. Kalau kondisi keamanan yang kondusif tentu akan lebih memudahkan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Tetapi sebaliknya kalau kondisi keamanan yang tidak kondusif tentunya akan menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

4. Penutup

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang disampaikan di atas, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Sangsit meliputi : partisipasi masyarakat dalam perencanaan lewat ikut serta dalam Musrenbangdes, partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi dalam pengawasan dan evaluasi, serta partisipasi dalam menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan.
2. Hambatan-hambatan yang dijumpai masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di desa Sangsit berupa hambatan internal yang terdiri dari kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Kondisi eksternal yang berupa kondisi politik dan keamanan wilayah desa Sangsit dan sekitarnya.

Daftar Pustaka

- Atmaja, Nengah Bawa, 2011, Tajen Arena Pengaktualisasian Homo Ludens dan Homo Esparans, *makalah*, Seminar “Sabungan Ayam Dalam Kehidupan Masyarakat Adat Bali”, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Singaraja
- Bungin,Burhan, 2012, *Analisis Data Kualitatif : Pemahaman Filosofis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Perkasa : Jakarta
- Chaniago, Adrinof A., 2001, *Gagalnya Pembangunan, Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia*, Pustaka LP3ES : Jakarta
- Harahap, Sofyan Safri, 2011, *Budgeting Peranggaran Perencanaan Lengkap Untuk Membantu Manajemen*, Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Koentjaraningrat, 2002, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Grafindo Utama : Jakarta
- Mudiarsa, Gede, 2015, Kepemimpinan Perbekel Untuk Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Desa di Desa Bungkulun Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panji Sakti Singaraja.
- Ndraha,Taliziduhu, 2004, *Pembangunan Masyarakat*, PT.Bina Aksara : Jakarta
- Siagian, Sondang P., 2006, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung : Jakarta
- Soetrisno, Lukman, 2005, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius : Yogyakarta
- Subarsono,AG., 2007, *Analisis KebijakanPublik-Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta : Bandung
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2006, *Perencanaan Pembangunan*, Gunung Agung : Jakarta
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 2012, *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Trianto, 2009,*Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, Kencana : Jakarta
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.